

KEBIJAKAN LUAR NEGERI RI DI BAWAH SOEHARTO (1966 – 1998)

Prof. Aleksius Jemadu, Ph.D.

Tiga isu penting bagi Soeharto:

Basis kekuasaan (militer, teknokrat dan mahasiswa)

Pembangunan ekonomi (sumber legitimasi)

Pragmatisme kebijakan luar negeri (dukungan Barat)

Dominasi militer dan isu HAM

“Dwifungsi ABRI” dan pelanggaran HAM

Sikap anti-komunisme dan invasi ke Timor Timur

Pentingnya stabilitas regional dan ASEAN

- Tahun 1950an dan awal 1960an Asia Tenggara menjadi ajang pertarungan kepentingan strategis negara-negara besar dalam konteks Perang Dingin: AS, Uni Soviet dan China.
- Konfrontasi dengan Malaysia di bawah Soekarno menimbulkan kecurigaan terhadap Indonesia. Soeharto melakukan rekonsiliasi dengan Malaysia
- Tiongkok dituduh mendukung G 30 S PKI berujung pada pembekuan hubungan diplomatik dengan Tiongkok.
- Pembentukan ASEAN tahun 1967 menjadi awal dari terbentuknya platform regional kebijakan luar negeri Indonesia sampai sekarang sebagai upaya meningkatkan bargaining power menghadapi negara-negara besar.
- ASEAN juga dilihat sebagai mekanisme untuk “menjinakkan” Indonesia agar tidak agresif terhadap tetangganya di Asia Tenggara. Adakah kesan Indonesia “dimanfaatkan” oleh tetangganya?

Tonggak penting KLN RI terkait ASEAN

- Tahun 1971 dikeluarkannya Deklarasi ZOPFAN (Asia Tenggara sebagai *Zone of Peace, Freedom, and Neutrality*).
- 1976 penetapan *Treaty of Amity and Cooperation* (TAC) - penyelesaian konflik secara damai dan tidak menggunakan kekuatan militer. Disebut juga *Bali Concord I*.
- Awal tahun 1990an dimulainya *ASEAN Free Trade Agreement* (AFTA).

Pembagian kebijakan luar negeri Soeharto

1966 – 1985: “low profile”

1985 – 1998: “high profile”

Periode 1985 - 1998: “high profile”

- Pembangunan ekonomi mulai menunjukkan hasil yang positif dan stabilitas politik terjaga
- Indonesia merayakan 30 tahun Konferensi Asia Afrika 24 April 1985 untuk menegaskan kembali kemampuannya memimpin Asia-Afrika
- Indonesia menjadi lebih aktif di OIC (Organization of Islamic Conference)
- Indonesia memprakarsai JIM I dan II (*Jakarta Informal Meeting*) untuk penyelesaian konflik Kamboja
- Pengaktifan kembali hubungan diplomatik dengan Tiongkok
- Indonesia menjadi Ketua Gerakan Non-Blok (1993)
- Indonesia tuan rumah APEC Meeting yang menghasilkan Bogor Declaration
- Indonesia semakin asertif mempertahankan pendudukannya atas Timor Timur

Kebijakan luar negeri RI pasca-Perang Dingin (1990an)

- Soeharto “ditinggalkan” oleh dunia Barat (AS) dan menjadi target kritik terhadap pelanggaran HAM (khususnya di Timor Timur)
- Isu demokratisasi, HAM dan lingkungan hidup mengemuka dan Indonesia memiliki reputasi yang negative di mata dunia internasional
- Meskipun demikian Indonesia terus menjalankan kebijakan ekonomi neoliberalisme dan bekerja sama dengan lembaga pembangunan dan keuangan internasional yang berujung pada krisis ekonomi tahun 1997.
- Soeharto merangkul kekuatan Islam melalui Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) untuk memperkuat posisinya “menantang” Barat
- Soeharto menindas gerakan demokratisasi yang mulai bangkit menentang kekuasaannya.

Perbandingan Orde Baru vs Reformasi

Orde Baru	Zaman Reformasi
Pembangunan ekonomi dan terikat dengan Barat (AS)	Pembangunan ekonomi tanpa terikat dengan Barat (AS)
Stabilitas politik melalui kekuasaan yang otoriter – pelanggaran HAM	Stabilitas politik dalam kerangka demokrasi – komitmen yang jelas melindungi HAM
Pembangunan ekonomi berujung krisis ekonomi (KKN)	Pembangunan ekonomi dan pengakuan dunia internasional (G 20)
Indonesia dikritik dalam isu “good governance”	Good governance menjadi perhatian utama dan teknologi informasi menjadi isu penting

Referensi:

- Rizal Sukma (1995). “The Evolution of Indonesia’s Foreign Policy: An Indonesian View”. *Asian Survey*, Volume 35 No. 3 (March 1995). pp. 304 - 315.
- Suryadinata, L. (1996). *Indonesia’s foreign policy under Soeharto, aspiring international leadership*. Singapore: Times Academic Press.